



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pentingnya Pembangunan Politik dalam Menjaga Stabilitas Negara

Insan Cendikia Muslim¹, Halifa Uswatun², Ghina Jelita Permana³

¹Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, jmsancendikia@gmail.com

²Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, halifauswatun1@gmail.com

³Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, ghinaajelita6@gmail.com

Abstrak: Pembangunan politik merupakan salah satu aspek krusial dalam menciptakan dan menjaga stabilitas suatu negara. Melalui pembangunan politik yang efektif, negara dapat membentuk sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat. Stabilitas negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan lembaga politik yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, dan penegakan hukum yang adil. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya pembangunan politik dalam menjaga stabilitas negara. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembangunan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi sistem politik, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini menyoroti peran pembangunan politik dalam beberapa aspek utama, yaitu: pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi, pembangunan politik sebagai bagian dari operasi negara bangsa, dan pembangunan politik sebagai sarana mobilisasi serta peningkatan partisipasi massa. Dengan demikian, pembangunan politik menjadi elemen strategis dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.

Kata Kunci: Pembangunan, Stabilitas, Partisipasi, Negara, Ekonomi

Abstract: Political development is one of the crucial aspects in creating and maintaining the stability of a country. Through effective political development, the country can form a democratic, transparent, and responsive government system to the aspirations of the people. The stability of the country is greatly influenced by the existence of strong political institutions, active community participation, and fair law enforcement. This article aims to examine the importance of political development in maintaining the stability of the country. The method used is a literature study by examining various relevant scientific sources. The results of the discussion show that political development not only functions as a means of modernizing the political system, but also as the main foundation in creating order, security, and sustainability of national and state life. This article highlights the role of political development in several main aspects, namely: political development as a political prerequisite for economic development, political development as part of the operation of the nation state, and political development as a means of mobilizing and increasing mass participation. Thus, political development becomes a strategic element in maintaining national stability amidst global dynamics.

Keywords: Development, Stability, Participation, State, Economy

*Correspondence Address:	ghinaajelita6@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
------------------------	-----------------	----------------	------------------

	2 Juni 2025	2 Juni 2025	30 March 2026
--	-------------	-------------	---------------

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Kata pembangunan mungkin saja sangat akrab di telinga kita. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Namun, dalam sebagian besar masyarakat, pembangunan selalu diartikan sebagai manifestasi fisik, (Kartono & Nurcholis, n.d.). Persoalan minimnya pengetahuan atas ruang lingkup suatu ilmu atau kajian tertentu kadang kala berujung pada blunder dalam penerapan ilmu tersebut ketika dihadapkan dengan persoalan real yang ada di masyarakat. Apalagi dalam debat pembangunan, batasnya sangat luas, oleh karena itu para ahli berusaha menyempurnakan penelitian pembangunan menjadi sub-studi yang spesifik, khususnya penelitian tentang pembangunan politik, (Haridison, 2013).

Pembangunan merupakan topik penting yang terus diperdebatkan, baik di negara terbelakang maupun di negara berkembang dan maju. Meskipun konteks yang dibahas dan metode yang digunakan berbedabeda, pada prinsipnya ada satu tujuan yang diharapkan dari semuanya, dan itu adalah untuk memindahkan negara mereka dari keadaan aktualnya saat ini ke keadaan yang dianggap sebagai keadaan normatif yang lebih baik, (Hasanah & Musyafak, 2017). Huntington dalam (Haridison, 2013) menekankan bahwa pembangunan politik bukanlah fenomena yang terisolasi, tetapi memiliki beberapa dimensi. Menurutnya, pengertian pembangunan politik dapat dilihat secara geografis, derivatif, teleologis dan fungsional.

Konsep pembangunan politik, yaitu perubahan dan modernisasi politik. Selanjutnya dibahas pula konsep pembangunan politik dalam konotasi geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda sehingga sulit dirumuskan definisi tunggal tentang pembangunan politik yang meliputi seluruh aspek pembangunan politik. Karena itu akan disajikan aneka ragam definisi pembangunan politik. Dari berbagai pemahaman definisi pembangunan politik, dapat dikemukakan bahwa gejala atau ciri utama pembangunan politik, yaitu equality (persamaan), capacity (kapasitas), dan differentiation and specialization (diferensiasi dan spesialisasi).

Stabilitas politik memainkan peran penting dalam memastikan kesuksesan ekonomi dan sumur masyarakat. Dalam konteks ini, stabilitas politik tidak hanya mengacu pada ketenangan konflik internal, tetapi juga konsistensi kebijakan dan kepercayaan pada lembaga pemerintah. Hubungan antara stabilitas politik dan ekonomi adalah bahwa stabilitas politik menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi dan bisnis umumnya berkembang lebih baik dalam suasana politik yang stabil, karena mereka dapat memastikan prediktabilitas dan kepastian hukum.

Stabilitas politik suatu negara memengaruhi tingkat investasi. Jika suatu negara mengalami ketidakstabilan politik, investor ragu-ragu untuk berinvestasi untuk risiko yang tidak pasti. Tujuan memuat pertanyaan artikel yang harus di jelaskan pada pembahasan dan di jawab pada kesimpulan. Stabilitas politik memungkinkan pemerintah untuk merancang dan mengimplementasikan politik jangka panjang yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan sumur masyarakat yang berkelanjutan. Peran lembaga-lembaga politik dalam menjaga stabilitas adalah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik melalui pengawasan, keseimbangan kekuasaan, keadilan dan transparansi. Kepemimpinan yang kuat dan stabil di tingkat politik nasional juga merupakan kunci untuk menjaga stabilitas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Pentingnya Pembangunan Politik Dalam Menjaga Stabilitas Negara dengan itu artikel ini membahas makna Peran Pembangunan Politik Menjaga Stabilitas Negara.

METODE | METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Metode studi literatur atau dikenal juga dengan istilah studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Ungkapan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Moh.Nazir, 2015:111) yang mengatakan bahwa studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku- buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat (Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, 2002:90) yang mengungkapkan bahwa studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.

Alasan kami menggunakan metode studi literatur karena menawarkan efisiensi waktu dan biaya, memungkinkan peneliti mengakses berbagai sumber informasi yang telah tersedia tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Dengan menelaah literatur yang relevan, peneliti dapat membangun landasan teoretis yang kuat, memahami perkembangan terbaru dalam bidang studi, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat menjadi fokus penelitian selanjutnya. Selain itu, metode ini membantu dalam merumuskan hipotesis yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap topik, serta menghindari duplikasi penelitian dengan memastikan bahwa studi yang dilakukan memberikan kontribusi baru terhadap ilmu pengetahuan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan mendalam, meskipun tanpa keterlibatan langsung dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Peran Pembangunan Politik dalam Menjaga Stabilitas Negara

Pada uraian pendahuluan di atas telah dikemukakan bahwa konsep pembangunan politik berkonotasi ganda baik secara geografis, derivatif, teleologis, maupun fungsional. Hal ini menyebabkan sulit untuk merumuskan definisi tunggal yang mencakup seluruh aspek dari pembangunan politik. Apabila Anda menyaksikan sidang-sidang yang berlangsung dalam gedung DPR-MPR maka betapa dinamis diskusi yang dilakukan oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif itu, sebagai salah satu struktur sistem politik Indonesia. Misalnya saja, melalui sidang umum MPR, yang terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD, para wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum, melantik calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, Presiden dan Wakil Presiden melalui Bappenas bekerja sama dengan DPR dan DPD merumuskan dan menetapkan Proenas yang mengandung rencana strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pada dasarnya Proenas menggambarkan program-program pembangunan nasional yang mengintegrasikan seluruh bidang pembangunan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan-keamanan. Karena itu pembangunan bidang tertentu berkaitan bahkan menjadi prasyarat bagi pembangunan bidang yang lain. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika ada definisi pembangunan politik yang menyatakan pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi dan sebagainya.

Para penulis Indonesia tentang pembangunan politik, seperti Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Dr. Yahya Muhaimin, Dr. Afan Gaffar dan lain-lain, dalam garis besarnya membahas tentang definisi pembangunan politik. Mereka telah mengutip atau

menerjemahkan definisi pembangunan politik yang telah dikumpulkan oleh Lucian W. Pye dalam usahanya mengembangkan teori pembangunan politik.

- 1) Pembangunan politik sebagai prasyarat politik bagi pembangunan ekonomi
Masalah pertumbuhan ekonomi dan perlunya mengubah perekonomian yang berjalan lambat menjadi dinamis dan mengandung pertumbuhan yang mandiri maka para ahli ekonomi segera menunjukkan bahwa kondisi-kondisi sosial dan politik dapat memainkan peranan penting dalam menghambat atau memperlancar peningkatan pendapatan per kapita sehingga wajarlah jika pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi (Paul A. Baran, 1957).

Akan tetapi dari segi pelaksanaan, pandangan demikian pada dasarnya cenderung bersifat negatif, sebab lebih mudah menunjukkan pada kita tentang keadaan sistem politik yang menghambat atau menghalangi jalannya pembangunan ekonomi dari pada menjelaskan bagaimana prestasi sistem politik merangsang pertumbuhan ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dalam aneka ragam sistem politik dengan berbagai kebijaksanaan umum yang ditempuh.

- 2) Pembangunan sebagai operasi negara bangsa

Sampai tingkat tertentu, semua keberatan di atas dapat ditampung oleh pendapat bahwa pembangunan politik terdiri atas pengorganisasian kehidupan politik dan prestasi fungsi-fungsi politik sesuai dengan standar yang diharapkan dari negara bangsa. Menurut pandangan ini ada asumsi bahwa secara historis telah ada bermacam-macam jenis sistem politik dan setiap kelompok masyarakat memiliki corak politiknya masing-masing, tetapi dengan lahirnya negara bangsa yang modern, timbullah serangkaian persyaratan mengenai kehidupan politik sehingga bila suatu masyarakat ingin berprestasi sebagai negara modern maka semua lembaga-lembaga politik dan praktek penerapannya harus disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Politik dari kerajaan-kerajaan lama, masyarakat kesukuan dan marga serta tanah jajahan haruslah memberikan jalan bagi kehadiran negara bangsa yang modern dan bisa bekerja efisien dan efektif dalam suatu sistem di lingkungan negara-negara bangsa lain.

Dengan demikian pembangunan politik menjadi suatu proses melalui mana masyarakat-masyarakat yang merupakan negara bangsa dalam bentuk dan berdasarkan pengakuan internasional menjadi negara bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Jelasnya, hal ini melibatkan pembinaan kemampuan untuk mempertahankan suatu tingkat ketertiban umum tertentu, memobilisasi semua sumber-sumber dalam usaha Bersama, serta membuat dan memenuhi secara efektif semua persetujuan-persetujuan internasional. Jadi, ukuran pembangunan politik akan meliputi: pertama, pembentukan serangkaian lembaga-lembaga politik tertentu yang merupakan prasarana penting bagi suatu negara bangsa. Kedua, pengungkapan secara tertib semua gejala-gejala nasionalisme ke dalam tatanan kehidupan politik. Sehingga bisa dikatakan bahwa pembangunan politik adalah politik nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga kenegaraan. Para sarjana seperti KH. Silvert (1964), Edward Shills (1962) dan William Maccord (1965) menggunakan pendekatan semacam ini.

Penting ditekankan bahwa dari sudut pandang ini nasionalisme adalah persyaratan penting tetapi masih kurang memadai untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan politik. Pembangunan meliputi serangkaian usaha

penterjemahan perasaan-perasaan nasionalisme yang simpang siur menjadi semangat kewarganegaraan, dan usaha pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menampung aspirasi masyarakat ke dalam kebijaksanaan dan program-program. Singkatnya, pembangunan politik adalah pembinaan bangsa.

3) Pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum

Apabila pembinaan bangsa, kita bagi menjadi pembinaan lembaga-lembaga dan pembinaan kewarganegaraan maka kita akan mendapatkan dua konsep pembangunan politik yang sangat umum. Sesungguhnya, konsep pembangunan politik sebagai pembinaan organisasi memiliki sejarah yang panjang dan menekankan kebenaran dari falsafah kolonial yang liberal. Sebab seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah pengaruh Barat terhadap bagian dunia lain, salah satu tema utama adalah kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat-masyarakat politik adalah mutlak untuk menciptakan tatanan hukum dan tatanan administrasi.

Tradisi ini memperkuat teori-teori masa kini yang menyatakan bahwa pembinaan birokrasi yang efektif harus mendapatkan prioritas utama dalam proses pembangunan. Menurut pandangan ini pembangunan administrasi erat kaitannya dengan penyebaran rasionalitas, makin kuatnya konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia.

Dengan sendirinya, tidak ada negara yang bisa disebut “maju” jika negara itu tidak memiliki kemampuan menangani masalah-masalah kemasyarakatan secara efektif. Biasanya negara-negara baru memiliki lembaga-lembaga administratif yang mampu menangani banyak masalah. Di lain pihak administrasi saja tidaklah cukup. Bahkan jika administrasi terlalu dipandang amat penting, ketimpangan-ketimpangan bisa timbul dan menghambat pembangunan politik. Terutama konsep pembangunan politik yang hanya diartikan sebagai perbaikan administrasi akan mengabaikan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi yang merupakan aspek-aspek penting pembangunan politik.

4) Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa

Aspek lain dari pembangunan politik terutama mengenai peranan warga negara dan standar-standar baru di bidang kesetiaan dan keikutsertaan rakyat. Mudah dimaklumi jika di negara-negara bekas jajahan, pembangunan politik diartikan sebagai suatu bentuk kesadaran politik di mana bekas rakyat yang terjajah menjadi warga negara yang aktif dan penuh cita-cita. Di beberapa negara pandangan demikian diterapkan secara ekstrim sehingga segi-segi efektivitas dan demonstrasi massa dianggap satu-satunya tujuan; para pemimpin maupun warga negara merasa bahwa mereka sedang memajukan pembangunan nasional melalui intensitas dan seringnya perasaan politik massa dalam demonstrasi demonstrasi yang dilakukan. Sebaliknya, beberapa yang sedang menjalankan kemajuan secara teratur dan efektif akan merasa tidak puas bila mereka merasa bahwa tetangga tetangganya sedang mengalami “pembangunan” yang lebih besar. (Clifford Geertz, 1963 dan Rupert Emerson, 1960).

Menurut pandangan bagian terbesar orang, pembangunan politik memang mencakup perluasan partisipasi massa, tetapi sangat penting dibedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan perluasan itu. Menurut sejarah, di negara-

negara Barat dimensi pembangunan politik erat bertalian dengan perluasan hak memilih dan diperkenalkannya unsur-unsur baru dari masyarakat ke dalam proses politik. Proses partisipasi massa ini berarti penyebarluasan proses pengambilan keputusan, dan partisipasi itu mempunyai pengaruh terhadap pilihan dan keputusan. Tetapi di beberapa negara baru partisipasi massa itu belum diimbangi dengan proses pemilihan yang memadai, bahkan hanya sekadar bentuk baru dari tanggapan rakyat terhadap manipulasi golongan elit. Memang harus diakui bahwa partisipasi terbatas seperti itu memainkan peranan dalam pembinaan bangsa karena turut menciptakan kesetiaan baru dan perasaan identitas nasional baru.

Dengan demikian, proses partisipasi massa adalah bagian penting dari pembangunan politik, di mana ia selalu berhadapan dengan berbagai hambatan emosionalisme yang kaku ataupun penghasut-penghasut yang membahayakan. Keduanya dapat menguras habis sumber daya masyarakat. Masalahnya memang merupakan persoalan klasik tentang bagaimana mencari keseimbangan antara aspirasi rakyat dengan pemeliharaan ketertiban umum, itulah merupakan masalah dasar demokrasi.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan politik merupakan pilar fundamental untuk menjaga stabilitas negara yang berkelanjutan, pembangunan politik sangat penting. Penguatan institusi politik, pembangunan sistem pemerintahan yang demokratis, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik adalah semua bagian dari proses ini. Banyak dimensi konsep pembangunan politik geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional menunjukkan betapa kompleks dan luasnya penelitian ini. Membangun legitimasi pemerintah, mengelola konflik secara damai, dan menegakkan hak asasi manusia adalah semua bagian dari pembangunan politik, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai perspektif yang telah dibahas. Selain itu, pembangunan politik berfungsi sebagai alat strategis untuk membangun budaya politik yang dewasa, fleksibel, dan inklusif untuk menangani dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, terbukti bahwa pembangunan ekonomi dan sosial terkait erat dengan pembangunan politik. Sistem politik yang stabil, transparan, dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan iklim investasi. Untuk menjadi negara yang kuat, berdaulat, dan responsif terhadap keinginan rakyat, pembangunan politik harus menjadi prioritas utama dalam rencana nasional.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Edy Kurniawansyah, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu yang telah dengan penuh kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber, yaitu Halifa Uswatun, Ghina Jelita Permana, dan Insan Cendikia Muslim, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman yang sangat berharga sebagai bagian penting dalam kelengkapan data penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut memberikan dukungan moral maupun material selama proses penelitian ini berlangsung. Semoga segala bentuk bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

REFERENSI | REFERENCE

- Budiardjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriani, L. (2021). Partisipasi Politik dan Tantangannya dalam Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Politea: Kajian Politik dan Pemerintahan*, 3(1), 45–58
- Irawan, R. (2020). Pembangunan Politik dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 12–25
- Haryanto, A. 2021. Pembangunan Politik dalam Konteks Ketahanan Nasional. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 12 (1). 45-56
- Haryanto, S. (2017). *Pembangunan Politik di Indonesia: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmawati, H., Kusmiyati, K., Sutrio, S., Kurniawan, E., & Sakdiyah, H. (2018). Implementasi Metode Real Experiments dan Virtual Experiments Pada Pembelajaran Fisika di SMAN 1 Kediri. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Teknologi*, 4(2), 185–191.
- Kurniawansyah, E., Puspita, N., Haslan, M. M., & Zubair, M. (2023). Akulturasi budaya lokal dan agama dalam tradisi pengantian pada masyarakat Desa Tepas Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), September.
- Nugroho, Riant. *Politik dan Pemerintahan di Era Digital: Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Negara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2021.
- Nur Andini Sari. *Stabilitas Politik: Pondasi bagi Pertumbuhan dan Kesejahteraan*, November 14, 2023 <https://fuad.iainpare.ac.id/2023/11/stabilitas-politikpondasi-bagi.html>
- <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/560453-pembangunan-politik-c3bfc892.pdf>
- [https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/583751-konsep-dasar-pembangunan politikad6e1bdc.pdf](https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/583751-konsep-dasar-pembangunan-politikad6e1bdc.pdf)